



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2025

2025

**KANTOR CAMAT
TANJUNG HARAPAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Jalan M. Dachri Desa Tanjung Haru Kode Pos : 76261

Email : tanjungharapan7621i@gmail.com Website : <http://kectanjungharapan.paserkab.go.id/paser.go>

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN

NOMOR: 24 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR TANJUNG HARAPAN
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Tanjung Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006 -2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

20. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan : -

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

PERTAMA :

Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja Tahun 2025 pada Kecamatan Tanjung Harapan.

KEDUA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Aru

Tanggal : 09 Januari 2024

Camat


H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT sehingga Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025 . Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Tanjung harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasihyang sebesar- besarnya.

Tanjung Aru, 10 Juli 2024

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1 - 3
1.2 Landasan Hukum.....	3 - 5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5 - 6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Rentra SKPD	7 - 15
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD.....	16 - 21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21 - 24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24 - 37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	38 - 40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40 - 41
3.3 Prgram dan Kegiatan.....	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	42 - 44
4.2 Matriks Pendanaan	45 – 53
 BABV PENUTUP	 54

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023.....	8 – 9
Tabel TC– 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Rentstra SKPD s/d	
Tahun 2024	12 – 15
Tabel 2..2.1 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023	18 – 19
Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung	
Harapan.....	20 – 21
Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Kantor Camat Tanjung	
Harapan.....	25 – 36
Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	37
Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan	
Prakiraan Maju Tahun 2026	47 – 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan Renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Rancangan Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah “tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah”. Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Perumusan Renja Perangkat Daerah, merupakan proses Akhir rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, **Penelitian dan Pengembangan** Kabupaten Paser menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil

Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor ..);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tanjung Harapan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan
- 4.2 Matrik Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjung Harapan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan selama Tahun 2025 serta perkiraan Target Anggaran Berikutnya.

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian Realisasi, kemajuan dan kendala yang di hadapi dalam rangka pencapaian Visi dan misi, supaya dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Inputs), keluaran (outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kantor Kecamatan Tanjung Harapan mendapatkan Alokasi Anggaran dari APBD Perubahan Kabupaten Paser sebesar Rp. 4.485.468.052,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah). Realisasi penyerapan Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.405.477.644,00 (Empat milyar empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat-puluh empat rupiah) atau sebesar 98,22% dari seluruh total anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut telah digunakan untuk membiayai belanja operasi sebesar Rp. 4.359.157.644,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 46.320.000,00 (Empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan 6 Program, 14 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.

PD Kecamatan Tanjung Harapan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, dan realisasi renstra PD Kecamatan Tanjung Harapan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.1 berikut ini.

Tabel 2.1.1
Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Tanjung
Harapan Tahun 2023

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Persentase keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kantor Camat Tanjung Harapan			4.485.468.052	4.405.477.644	100	98,22
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.440.000	30.840.000	100	98,09
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.720.000	15.720.000	100	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.720.000	15.720.000	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.616.188.246	2.570.893.939	100	98,27
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.381.867.946	2.338.285.059	100	98,17
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	229.280.300	227.568.880	100	99,25
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.040.000	5.040.000	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		252.142.926	247.648.301	100	98,22
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.747.676	1.746.000	100	99,90

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.311.730	52.125.000	100	97,77
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.133.520	25.133.300	100	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.150.000	6.150.000	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.615.500	23.612.000	100	99,98
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.615.500	23.615.500	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		28.278.020	27.936.464	100	98,79
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.818.020	26.818.020	100	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.460.000	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		16.447.500	16.447.500	100	100
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.447.500	16.447.500	100	100

		Penyelenggara nUrusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		48.615.000	48.060.000	100	98,96
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.807.500	16.807.500	100	99,84
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.807.500	31.807.500	100	98,34
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		375.769.960	366.613.510	100	97,56
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	375.769.960	366.613.510	100	97,56
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum		28.870.000	28.870.000	100	100
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.870.000	28.870.000	100	100
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		336.740.000	336.590.000	100	99,96

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	336.740.000	336.590.000	100	99,96
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		134.726.400	134.139.800	100	99,56
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	59.576.400	59.576.400	100	100
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75.150.000	74.563.400	100	99,22
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		72.247.000	72.050.000	100	99,73
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.807.500	16.807.500	100	100

			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	16.807.500	16.807.500		100
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.982.000	10.795.000	100	98,30
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27.650.000	27.640.000	100	99,96
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		520.387.500	501.776.130	100	96,42
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	520.387.500	501.776.130	100	96,42
		Jumlah	4.485.468.052		4.405.477.644	100	98,22

Berdasarkan hasil Evaluasi, Program dan kegiatan tahun 2023 telah terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan rata-rata mencapai 100%. Namun masih ada beberapa Program dan Kegiatan yang pencapaian Realisasi Keuangan dibawah 100%. Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Anggaran Perubahan 2023 terdapat Penambahan Anggaran sebesar Rp.375.769.960 untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yaitu untuk Pelaksanaan Kegiatan PORKAB Paser ke XII. Pada Tahun 2023 pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di dalam Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tanjung Harapan Sebagai Tuan Rumah dalam Pelaksanaan kegiatan TTG ke IX Tingkat Kabupaten Paser yang diikuti oleh 10 (sepuluh) Kecamatan Se-Kabupaten Paser yang dilaksanakan pada bulan November

Tahun 2023 di Desa Tanjung Aru Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser. Adapun beberapa hal yang menjadi evaluasi bagi PD Kecamatan Tanjung Harapan antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja

A. Faktor Penyebab Keberhasilan dalam Pencapaian Target Kinerja

Yang mendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan antara lain ;

- Adanya komitmen, Kerjasama dan pembagian tugas yang tepat sesuai dengan Tupoksi pegawai.
- Perencanaan Program yang tepat dengan perencanaan Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang berarti yang dihadapi PD Kecamatan Tanjung Harapan dalam pencapaian target kinerja dan keuangan. Yang terjadi hanya ada beberapa kegiatan yang pada realisasinya mengalami perubahan jumlah output (keluaran).

Selain itu juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dikarenakan anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Implementasi atau dampak langsung yang timbul dari pencapaian target realisasi capaian kinerja terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/Kelurahan
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur pemerintah
- Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi terkait
- Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Meningkatnya Percepatan Pembangunan Kecamatan

2. Kebijakan untuk menindaklanjuti kegagalan pencapaian Target

Adapun Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang dapat dilakukan untuk pencapaian Target Kinerja program / kegiatan antara lain:

- Lebih difokuskan pada Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang lebih matang
- Mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor.
- Melakukan efisiensi serta efektifitas penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
- Evaluasi dan Estimasi serapan anggaran secara berkala sebagai bahan pertimbangan saat penyusunan anggaran perubahan ditahun berjalan.
- Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada sub bagian program dan keuangan
- Perlu adanya pembinaan dan peningkatan ketrampilan serta kompetensi Aparatur Kecamatan

Rincian ikhtisar realisasi anggaran target kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Tc-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

	k o d e					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun Lalu (n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun berjalan (2024)	
										Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						URUSAN KEWILAYAHAN									
7	01					KECAMATAN									
7	01	001				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	70	72	72	100%	72	72	72%
7	01	001	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan Waktu dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran PD	100%	100%	100%	100%	100%	100	300	30%
							Nilai Evaluasi Sakip oleh Inspektorat Kabupaten	A (80,10)	-	B 65	B (61,20)	100.81%	B 65,53	-	B
7	01	001	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100							
7	01	001	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100							

	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun Lalu 2023(n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun berjalan (2024)	
										Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	001	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang Menyusun dan menetapkan Dokumen Keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300%	30%
7	01	001	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 orang /bulan	144 orang/ bulan	144 orang/bulan	144 orang/bulan	100%	144 orang/bulan		
7	01	001	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen							
7	01	001	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir dan laporan Hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan							
7	01	001	2	05		Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian IKI dengan nilai ≥ 80	100%	0%	0 %	100 %	100%	100 %	0%	%

7	01	001	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	0	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	12 Dokumen		
7	01	001	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum PD yang berjalan dengan baik	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	300 %	30%
7	01	001	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
7	01	001	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
7	01	001	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
7	01	001	2	06	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								
7	01	001	2	06	05										
7	01	001	2		08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang Pelayanan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	30%
7	01	001	2		09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Inventaris pada PD dalam kondisi baik	100%	100%	100 %	100 %	100%	100	300 %	30%
7	01	002				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80%	70%	70%	72%	72%	100%	212 %	30,03%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023(tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2024	
									Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	002	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	01	002	2	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	01	002	2	04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	100%	0%	0%	0%	0%	100%	50%	50%
7	01	003			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	85	70%	70%	70%	100%	75%	50%	50%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023 (tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2024	Kode
									Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	003	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	33%	33%
7	01	004			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	70	50	50%	50%	100%	55%	50%	50%
7	01	004	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	01	004	2	02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Penerapan Perda dan Penegakan Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	01	005			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	01	005	2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2023(tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2024	
									Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	006			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP kepala desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	50%
7	01	006	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	7 Desa	-	7 Desa	7 Desa	100%	7 Desa	7 Desa	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

PD Kecamatan Tanjung Harapan yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjung Harapan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Inputs), keluaran (outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA %
			TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (65)	B (65,53)	100,82 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM	81	81,99	101,22%
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	51	84,1	164,90%
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	7,30	3,35	45,89%
	RATA-RATA CAPAIAN IKU				103,21%

Analisis Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjung Harapan dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut :

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasion al	TARGET IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				CATATAN ANALISIS
					Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thnn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thnn-1)	Tahun 2024 (thn n) s/d tw 2	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Program												
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat			Indeks	70	72	74	76	70	72	40	0	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			Indeks	70	72	74	76	70	72	50	0	
3	Tingkat pertumbuhan Usaha/Kelompok Usaha baru			Persen	70	75	80	85	70	75	25	0	
4	Persentase Penurunan kasus Gangguan keamanan dan ketertiban			Persen	50	55	60	65	50	55	30	0	
5	Persentase Kasus Konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah Kecamatan			Persen	100	100	100	100	100	100	50	0	
6	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu			Persen	100	100	100	100	100	100	50	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Tanjung Harapan sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan. Kecamatan Tanjung Harapan berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan di atas standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Tanjung Harapan didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dari berbagai disiplin ilmu. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjung Harapan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tanjung Harapan:
 - a. Terbatasnya jumlah pegawai di Kecamatan Tanjung Harapan sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Tanjung Harapan
 - b. Belum tersedianya Jaringan Listrik disiang hari dan Jaringan Internet yang belum optimal.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - d. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kab Paser.
 - e. Tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan.

- f. Perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - g. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program – program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
- Tantangan :
- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shoft Ware – Hard ware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
 - b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
 - c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
 - d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik, mempunyai Peluang untuk :
 - Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
 - Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
 - Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat;
 - Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan TanjungHarapan terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- i. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada tahun 2025 akan diadakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pada tahun 2025 diadakan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan cepat bagi masyarakat.
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada tahun 2025 dilaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk terlaksananya program prioritas yang ada di Desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2023.

2.4.1 Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).

2.4.2 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang

prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

- 2.4.3 Untuk review terhadap RKPD tahun 2025 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T- C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 di bawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025
Kantor Camat Tanjung Harapan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	KECAMATAN					3.267.313.027						4.412.884.110	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	76	2.553.558.517	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	76	3.435.718.410	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	%	100	14.250.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	%	100	42.072.000	
			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	N/A	74				Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	N?A	74		

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	6.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	30.792.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	11.280.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan ditindaklanjuti	%	100	2.350.961.753	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan ditindaklanjuti	%	100	2.982.455.974	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	144	2.145.837.253	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	144	2.730.111.654	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	100	196.212.940	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	100	221.552.320	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	8.911.560	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	30.792.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase rata-rata capaian IKI dengan Nilai ≥ 80	%	100	15.520.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase rata-rata capaian IKI dengan Nilai	%	100	18.800.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	15.520.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	18.800.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Pelayanan Administrasi umum PD yang berjalan dengan baik	%	100	111.871.784	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Pelayanan Administrasi umum PD yang berjalan dengan baik	%	100	290.745.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	13	2.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	13	8.149.400	

			Kantor yang Disediakan					Harapan	Kantor yang Disediakan				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah ATK dan peralatan ruamh tangga yang disediakan	item	38	23.134.210	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah ATK dan peralatan ruamh tangga yang disediakan	item	38	26.965.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	10.542.654	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	10.804.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	76.094.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	244.826.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100	28.910.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	%	100	29.174.136	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	27.810.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	27.974.136	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Presentase Inventaris Barang dalam kondisi baik	%	100	32.445.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Presentase Inventaris Barang dalam kondisi baik	%	100	72.470.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	68.910.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	3	1.545.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	3	3.560.000	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase barang Inventaris Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	%	100	17.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase barang Inventaris Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	%	100	0	
	Pengadaan Mebel	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	10	17.000.000	Kec. TanjungHarapan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	10	17.000.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Desa yang menyampaikan LKP Desa tepat Waktu	%	100	136.647.370	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Desa yang menyampaikan LKP Desa tepat Waktu	%	100	201.702.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa	7	136.647.370	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa	7	201.702.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	12.263.698	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	67.228.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa	Dokumen	7	22.412.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa	Dokumen	7	62.100.000	
	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	7	22.170.750	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	7	41.439.000	

	Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumla Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	38.980.350	Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumla Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	19.350.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	21.404.580	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	11.585.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	84	79.739.415	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	84	175.002.200	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	%	100	23.895.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Presentase Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	%	100	27.743.700	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Laporan	7	16.463..700	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Laporan	7	16.463..700	

	Instansi Vertikal Terkait		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Instansi Vertikal Terkait		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi	Dokumen	150	23.895.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi	Dokumen	150	11.280.000	
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	20.895.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	80.062.500	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Surat Pengantar/Rekomendasi Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	150	20.895.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Surat Pengantar/Rekomendasi Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	150	26.805.000	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	53.257.500	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dikanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	34.949.416	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang dikanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	67.196.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Laporan	7	34.949.415	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Laporan	7	67.196.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	65	310.250.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	65	367.260.000	

12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	12.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	12.350.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokokh Agama dan Masyarakat	Laporan	1	12.750.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokokh Agama dan Masyarakat	Laporan	1	12.350.000	
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan		Persentase Penyelenggaraan penerapan dan Penegakkan	%	100	297.500.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan		Persentase Penyelenggaraan penerapan dan Penegakkan	%	100	297.500.000	

	Peraturan Kepala Daerah		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	297.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	297.500.000	

14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	10.617.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggara n Ketentramandan KetertibanUmum	%	100	10.617.500	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Isntansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Isntansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10.617.500	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanjung Harapan	Pengawasan dan Penegakan Perda Perkada	Desa	100	10.617.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	100	73.477.906			Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselasaikan di wilayah kecamatan	%	100	111.196.400	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	73.477.906	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	111.196.400	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	250	29.098.987	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	250	59.576.400	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	orang	20	22.561.073	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	orang	20	51.620.000	

			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan dikecamatan	Dokumen	1	10.207.225	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan dikecamatan	Dokumen	1	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	%	85	106.285.226	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	%	85	122.005.100	
16	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%	100	134.434.213	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%	100	122.005.100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Lembaga	7	10.750.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Lembaga	7	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pembinaan dan	Laporan	2	106.295.226	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pembinaan dan	Laporan	2	122.005.100	

			Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Hara pan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
--	--	--	---	--	--	--	--	-------------	---	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Tanjung Harapan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana Tabel TC.32

Tabel TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan

Nihil

Untuk tahun anggaran 2025, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan ke Kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem pembangunan Kabupaten Paser. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan bersinergi dengan dokumen Perencanaan lain, baik Nasional, maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser (RPJMD dan RKPD).

Berdasarkan penjabaran prioritas Nasional dan arah kebijakan pembangunan Nasional, jika di hubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka terdapat keterkaitan yang erat dalam prioritas pembangunan yang ke 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan

masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2021 – 2026 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan,akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitaskinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber-sumber dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, tersusunya program atau kegiatan yang ingin dicapai Kecamatan Tanjung Harapan dengan lebih realistis.

Visi dan Misi Kecamatan Tanjung Harapan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Paser yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026, yaitu “ **Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera (Paser MAS)**”.

dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas
2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata

- **Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, ditetapkan sasaran-sasaran Strategis yang lebih kongkrit seperti tersebut di bawah ini :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Perumusan atas Visi, misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan kebijakan atas rencana pengembangan KecamatanTanjung Harapan dalam kurunwaktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2021-2026.

Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang ResponsifDan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	BB (74)
		Meningkatnya Kualitas PelayananPublik di kecamatan	Nilai IKM	83
		Meningkatnya lingkungan DaerahYang Kondusif	Angka Kriminalitas	49
2	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Meningkatnya KesejahteraanMasyarakat	Angka Kemiskinan	6,30

3.3 Prorgam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan permendagri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Va, idasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kallsifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan Momenklatur, sehingga program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yangdilaksanakan harus mengacu pada permedagri 050-5889.

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, ada beberapa Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait kewenangan lain yang dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Harapan pada dasarnya mengacupada Permendagri No 86 tahun 2017 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 - Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
 - Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Tanjung Harapan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tanjung Harapan akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser berkedudukan sebagai perangkat Daerah yang langsung dan bertanggungjawab kepada Bupati Paser, dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No.23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser dan tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, program dan kegiatan dalam Tahun 2025

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasikan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

4.2 MATRIKS PENDANAAN

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 . Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yaitu **MENUJU**

KABUPATEN PASER MAS (MAJU, ADIL, SEJAHTER) dengan *tujuan* meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik yang ukuran indikatornya adalah Indeks Kepuasan masyarakat (IKM).

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Tanjung Harapan menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjung Harapan
2. Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Harapan pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2025.

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Harapan secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan dan perkiraan maju untuk tahun 2025. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN PASER

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
7	01				KECAMATAN				4.116.189.373					3.318.257.439
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kec. Tanjung Harapan	76 %	3.322.595.773	APBD			80 %	2.555.438.517
7	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD dan Terevaluasinya Kinerja SKPD	Kec. Tanjung Harapan	5 Dokumen	35.832.000	APBD	dministrasi Perencanaan Kecamatan Tanjung Harapan		5 Dokumen	14.250.000
7	01	001	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	5 Dokumen	25.152.000	APBD	Administrasi Perencanaan Kecamatan Tanjung Harapan		5 Dokumen	6.750.000
7	01	001	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec. Tanjung Harapan	5 Laporan	10.680.000	APBD	Administrasi Perencanaan Kecamatan Tanjung Harapan		5 Laporan	7.500.000

7	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase PD yang dan menetapkan	Kec. Tanjung Harapan	100 %	2.955.779.974	APBD	ASN Kantor Kecamatan Tanjung Harapan		100 %	2.389.303.046
7	01	001	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	182 Orang/ bulan	2.730.111.654	APBD	ASN Kantor Kecamatan Tanjung Harapan		144 Orang/ Bulan	2.176.024.011
7	01	001	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung harapan	5 Dokumen	210.272.320	APBD	Bagian Keuangan Kantor Camat Tanjung Harapan		5 Dkumen	202.099.326
7	01	001	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	2 Laporan	15.396.000	APBD	Bagian Keuangan Kantor Camat Tanjung Harapan		2 Laporan	8.911.560
7	01	001	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan Nilai ≥ 80	Kec. Tanjung Harapan	100 %	16.920.000	APBD	Bagian Kepegawaian Kantor Camat Tanjung Harapan		100 %	15.120.000
7	01	001	02.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanjung Harapan	12 Dokumen	16.920.000	APBD	Bagian Kepegawaian Kantor Camat Tanjung Harapan		12 Dokumen	15.120.000
7	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi PD yang berjalan dengan baik	Kec. Tanjung Harapan	100%	238.906.963	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		100 %	123.395.748

7	01	001	02.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instralasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Tanjung Harapan	13 Paket	8.149.400	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		72 %	2.713.718
7	01	001	02.06	0001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tanjung Harapan	0	0	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		1 Paket	8.000.000
7	01	001	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tanjung Harapan	38 Paket	26.386.499	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		38 Paket	20.419.000
7	01	001	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Tanjung Harapan	5 Paket	9.459.064	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		5 Paket	10.858.933
7	01	001	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	85 Laporan	194.912.000	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		95 Laporan	81.404.097
7	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	100 %	29.174.136	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		100%	29.744.300
7	01	001	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	12 Laporan	1.200.000	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		12 Laporan	1.100.000
7	01	001	02.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanjung Harapan	12 Laporan	27.974.136	APBD	Bagian Umum Kantor Camat Tanjung Harapan		12 Laporan	26.644.300

7	01	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Inventarisasi pada PD dalam Kondisi Baik	Kec. Tanjung Harapan	100%	45.982.700	APBD	Bagian Umum dan Pengelola BMD Kantor Camatn Tanjung Harapan		100%	35.327.000
7	01	001	02.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tanjung Harapan	4 Unit	42.422.700	APBD	Bagian Umum dan Pengelola BMD Kantor Camatn Tanjung Harapan		2 Unit	31.827.000
7	01	01	02.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanjung Harapan	3 Unit	3.560.000	APBD	Bagian Umum dan Pengelola BMD Kantor Camatn Tanjung Harapan		3 Unit	3.500.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	76%	170.912.200	APBD	Masyarakat Tanjung Harapan		80 %	117.308.056
7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	100%	25.863.700	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		100%	41.947.500
7	01	02	02.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Tanjung Harapan	7 Laporan	16.463.700	APBD	Jumlah Laporan Sinergitas Perencanaa		7 Laporan	17.447.500

						Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
7	01	02	02.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	150 Dokumen	9.400.000	APBD	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		160 Dokumen	24.250.000
7	01	02	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	100 %	77.852.500	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		100 %	42.395.000
7	01	002	02.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	12 Laporan	26.805.000	APBD	Kegiatan Paten di Kecamatan		12 Laporan	18.500.000
7	01	002	02.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	4 Laporan	51.047.500	APBD	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		4 Laporan	23.895.000

7	01	02	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tanjung Harapan	100%	67.196.000	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		100%	32.965.506
7	01	02	02.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	2 Laporan	67.196.000	APBD	Kegiatan MTQ		2 Laporan	32.965.506
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan MasyarakatbDesa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	Kec. Tanjung Harapan	85 %	75.020.000	APBD	Masyarakat Desa Tanjung Harapan		85 %	106.347.398
7	01	03	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan	Kec. Tanjung Harapan	100 %	75.020.000	APBD	Masyarakat Desa Kec. Tanjung Harapan		100 %	106.347.398

7	01	03	02.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	4 Laporan	75.020.000	APBD	Masyarakat Tanjung Harapan		4 Laporan	106.347.398
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan Kasus gangguan keamanan dan ketertiban	Kec. Tanjung Harapan	65 %	363.500.000	APBD	Trantibum Kecamatan Tanjung Harapan		70%	317.979.617
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung Harapan	100%	12.350.000	APBD	Trantibum Kecamatan Tanjung Harapan		100%	17.754.617
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	1 Laporan	12.350.000	APBD	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	17.754.617
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Tanjung Harapan	100 %	351.150.000	APBD	Masyarakat Tanjung Harapan		100 %	300.225.000

7	01	04	02.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	12 Laporan	351.150.000	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		12 Laporan	300.225.000
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	100 %	108.796.400	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		100 %	81.504.204
	01	005	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi dengan Baik	Kec. Tanjung Harapan	100 %	108.796.400	APBD	Kantor Camat Tanjung Harapan		100 %	52.577.977
7	01	005	02.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	25 Orang	59.576.400	APBD	Pelajar dan Masyarakat Kec. Tanjung Harapan		25 orang	30.000.000

7	01	005	02.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	35 Orang	49.220.000	APBD	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Tanjung Harapan		35 orang	22.577.977
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu	Kec. Tanjung Harapan	100 %	75.365.000	APBD	Pemerintahan Desa Kec. Tanjung Harapan		100 %	139.679.647
7	01	006	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Laporan Pembinaan administrasi Keuangan Desa yang disusun	Kec. Tanjung Harapan	100 %	75.365.000	APBD	Pemerintahan Desa Kec. Tanjung Harapan		100 %	13.545.506

7	01	006	02.01	002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	19.750.000	APBD		Administ rasi Pemerint ahan Desa Kec. Tanjung Harapan	100 %	13.545.506
7	01	006	02.01	003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	10.350.000	APBD	Kec. Tanjung Harapan	Administrasi Keuangan Desa Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	22.412.500
7	01	006	02.01	004	Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	7 Laporan	14.330.000	APBD	Kec. Tanjung Harapan	Masyarakat Desa	7 Laporan	22.170.750
7	01	006	02.01	009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	19.350.000	APBD	Kec. Tanjung Harapan	Pemerintahan Desa Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	38.980.350
7	01	006	02.01	0015	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	2 Dokumen	11.585.000	APBD	Kec. Tanjung Harapan	Kantor Camat Tanjung Harapan	2 Dokumen	21.872.250
TOTAL									4.116.189.373					3.334.144.643,80

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan adanya dampak dari suhu politik saat ini, baik dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kecamatan Tanjung Harapan untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 yang telah disusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Tanjung Harapan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan indikasi program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Paser sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada didalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakan kegiatan di tahun 2025 nanti.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tanjung Harapan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Paser. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tanjung Harapan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 disusun, semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Tanjung Aru, 10 Juli 2024

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010